

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, setiap negara memiliki tujuan utama yang serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk melalui pembangunan ekonomi. Kesejahteraan merupakan dambaan insan manusia dalam hidup, dengan meningkatkan kesejahteraan umum inilah yang menjadi dasar tujuan dalam NKRI seperti tercantum pada pembukaan UUD 1945 alenia keempat, kesejahteraan masyarakat juga dapat mencerminkan prestasi yang diraih oleh daerah. Di Indonesia, pemerintah juga terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Daerah dengan jumlah penduduk besar memerlukan adanya kontrol supaya tidak berdampak buruk untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa memiliki populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh pusat aktivitas pemerintahan yang terkonsentrasi di Ibu Kota, yaitu Jawa. Selain itu, fokus perekonomian juga berada di Pulau Jawa karena kondisi tanah dan iklim yang menguntungkan, serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung transportasi darat, laut, dan udara. Pulau Jawa memiliki keunggulan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Akibatnya, penduduk di Pulau Jawa sangat padat, terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Jumlah penduduk di suatu daerah berdampak pada pendapatan daerah. Berikut adalah jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi-provinsi Pulau Jawa:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Per Provinsi di Pulau Jawa dan Jumlah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017

Provinsi	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Pendapatan Asli Daerah (Miliar)
DKI Jakarta	10.374	43.901
Banten	12.448	5.756
Jawa Barat	48.038	18.081
Jawa Tengah	34.258	12.547
Jawa Timur	39.293	17.324
DI Yogyakarta	3.762	1.851

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ke-2 setelah DKI Jakarta. Dengan usaha yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber daya yang ada digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa sistem pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Sebelumnya, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan sentralisasi, di mana pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam menetapkan kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh pemerintah daerah. Namun, penerapan sistem ini menghadapi banyak tantangan. Setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dan beban kerja di pemerintahan pusat menjadi terlalu berat, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan di seluruh wilayah. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah, diperlukan sistem yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada, lalu diterapkan sistem pemerintahan desentralisasi.

Secara garis besar, sistem pemerintahan desentralisasi dapat diartikan sebagai proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk

mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip negara kesatuan.

Kesuma (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang optimal akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan dukungan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efisien. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Merujuk pada Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah dapat terwujud. Dengan pengelolaan potensi daerah yang semakin baik, pendapatan yang diterima juga semakin tinggi, dan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Berikut perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat:

Tabel 1.2
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)	Rasio Pendapatan Asli Daerah
2013	12.360	19.237	64.25%
2014	15.038	22.310	67.40%
2015	16.032	24.009	66.77%
2016	17.042	27.694	61.53%
2017	18.081	32.163	56.21%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam konteks desentralisasi, diinginkan adanya peningkatan dalam penyediaan layanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Meningkatnya kualitas layanan publik diharapkan mampu menarik minat investor untuk membuka usaha di wilayah tersebut. Keberhasilan dari harapan ini tentu bergantung pada inisiatif pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung pembangunan untuk jangka panjang. Sebagai akibatnya, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah untuk mendukung tujuan ini.

Belanja modal umumnya digunakan untuk memperoleh aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Diharapkan bahwa dengan pesatnya pembangunan, pendapatan daerah akan meningkat. Belanja modal suatu daerah menjadi salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakatnya. Melalui peningkatan prasarana yang dibangun oleh pemerintah yang bermanfaat untuk masyarakat maka masyarakat akan menikmatinya dengan nyaman dan rela membayar retribusi atas fasilitas yang dinikmati tersebut. Sehingga melalui peningkatan kualitas layanan publik tersebut maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut perkembangan Belanja Modal di Jawa Barat:

Tabel 1.3
Rasio Belanja Modal Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Daerah (Miliar Rupiah)	Belanja Modal (Miliar Rupiah)	Rasio Belanja Modal
2013	18.396	1.272	6.9%
2014	20.797	1.359	6.5%
2015	24.417	2.298	9.4%
2016	27.621	2.859	10.3%
2017	32.706	2.311	7.1%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.3 Belanja Modal, menunjukkan bahwa jumlah Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Belanja modal berperan sebagai aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang dan menjadi dasar untuk meningkatkan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Hal tersebut sejalan menurut Hendarmin (2019), belanja modal memiliki dampak pada pembangunan, terutama dalam aspek pembangunan manusia. Belanja modal memberikan keuntungan dalam memfasilitasi hubungan lebih cepat antara pelaku ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya transaksi. Dengan adanya perkembangan pembangunan yang cepat yang berasal dari alokasi belanja modal, diharapkan akan ada peningkatan dalam pendapatan atau pemasukan daerah.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal tersebut harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Pembangunan Manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kalimat pembuka pada *Human Development Report (HDR)* edisi pertama yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (1990)

secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Menurut *Human Development Report* (1990) manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Indonesia mulai menghitung IPM pada tahun 1996. Kesejahteraan masyarakat tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup harapan hidup yang tinggi, tingkat melek huruf, dan penghasilan per kapita. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat:

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Rasio IPM
2013	68.25	1.4%
2014	68.80	0.8%
2015	69.50	1%
2016	70.05	0.8%
2017	70.69	0.9%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan. Jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi, dapat diasumsikan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan pembangunan berfokus pada pemberdayaan manusia

serta memberikan kebebasan bagi individu untuk mengaktualisasikan diri. Penelitian oleh Asnidar (2018) menunjukkan bahwa pembangunan manusia melibatkan proses memperluas pilihan bagi penduduk, sehingga mereka dapat menyumbangkan keahlian dan kemampuan mereka ke sektor produksi, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Hal ini menarik bagi calon investor, baik domestik maupun asing, untuk menginvestasikan dana mereka di sektor tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Belanja Modal dan Pembangunan Manusia Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survei pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Belanja Modal, Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2022.
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal dan Pembangunan Manusia secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Belanja Modal, Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Belanja Modal dan Pembangunan Manusia secara simultan dan parsial variabel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya Pendapatan Asli Daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 yang data keuangannya dapat diakses melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat .

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama Sembilan bulan, dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran.